

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hartono, C. F. G. S. (1988). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Binacipta.
- Miru, A. (2013). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Shidarta. (2014). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*. Panta Rei.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Buku V.
- Keeton, W. P., Dobbs, D. B., Keeton, R. E., & Owen, D. G. (1984). *Prosser and Keeton on the law of torts* (5th ed.). West Publishing.
- Weinrib, E. J. (1995). *The idea of private law*. Harvard University Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Abidin, A. Z. (2022). Rekonstruksi hukum berbasis hukum progresif. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Admiral, A., Arifin, R., Adinda, F. A., & Ahmed, S. (2025). Unfair terms in standard digital contracts. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Diana, D., & Lie, G. (2025). The application of strict liability principle in the protection of consumers of digital services. *Indonesian Journal of Law and Economics*.
- Efendi, J. (2024). Application on procedural justice vis-à-vis substantive justice in law enforcement. *Arena Hukum*. <http://eprints.ubhara.ac.id/2713/>
- Iqbal, M. (2025). Refleksi keadilan dalam norma hukum Indonesia. *Harisa*. <https://ejournal.eddhuhacenter.com/index.php/harisa/article/view/69>

- Irawan, A., & Wahyuni, F. (2025). Transformasi peran platform digital dalam transaksi elektronik. *Indonesian Law Review*.
- Muliawan, A., & Maharani, D. T. (2026). Consumer protection in electronic commerce. *SENTRI Journal*.
- Nasution, K. (2014). Penerapan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.
- Prihartanto, Y., Arifin, F., & Maarif, I. (2025). From legal formalism to algorithmic justice: Rethinking consumer protection in the digital economy. *Supremasi Hukum*.
- Putri, Y. P. B., Pramono, A., & Farida, A. (2026). Re-evaluasi klausul eksonerasi dalam perjanjian baku. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Rahardjo, S. (2010). Hukum progresif sebagai dasar pembangunan hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Saifullah, A., Adhhyputra, M. F., & Fikri, Z. (2024). Implikasi klausula eksonerasi terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Restorasi Hukum*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/3805>
- Sanjaya, S. (2025). Tanggung jawab hukum perdata dalam transaksi digital. *Berajah Journal*.
- Sulaiman, H., Marwati, L., & Alfarezi, S. (2025). John Rawls' theory of justice and its relevance. *Al Hairy Journal*. <https://journals.yapilin.com/index.php/hry/article/view/13>
- Widjaja, G., & Panggabean, R. I. (2024). Liability in digital platform economy.
- Widjiastuti, A., & Kartiko, N. D. (2025). Implementation of consumer protection from a human rights perspective in Indonesia. *Staatsrecht Journal*.
- Wibowo, D. E. (2019). Perlindungan konsumen yang berkeadilan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2296>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Smart Law Journal*.

Zulfah, S., et al. (2025). Legal responsibility of digital platforms in e-commerce. *International Review of Law*.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Lainnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik.

Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan transaksi digital dan perlindungan konsumen.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa konsumen dalam transaksi digital, apabila tersedia dan relevan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.